BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah desa adalah unit administratif terkecil di dalam struktur pemerintahan Indonesia. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung pembangunan lokal dan penyediaan layanan publik di tingkat desa. Desa dituntut mampu melakukan tata kelola keuangan yang baik mulai dari perencanaan, implementasi, pengawasan, hingga pertanggungjawabannya. APBDes mencerminkan alokasi dana desa yang direncanakan oleh pemerintah desa untuk berbagai program dan proyek.

Undang-Undang APBDes Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 yang menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang dimiliki desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri disebut dengan otonomi desa. UU tentang desa ini memberi otorisasi yang luas dalam mengelola tata pemerintah sendiri serta termasuk dalam pelaksanaan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.

V. Wiratna (2015: 33) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat

dan pemerintah atas pengelolaan Dana Desa (DD) dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program kegiatan yang dibiayai dengan uang desa.

Desa sebagai suatu bagian dari lembaga pemerintahan, tidak luput dari tuntutan transparansi dan akuntabilitas terkait pengelolaan keuangannya (Septiawan,2018). Di samping transparansi dan akuntabilitas, Pemerintahan Desa juga harus mampu menerapkan prinsip informatif atas setiap realisasi pelaksanaan APBDes. Untuk menyediakan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi diperlukan suatu sistem informasi yang mendukung.

Didalam menyediakan informasi terkait dengan pelaksanaan APBDes diperlukan suatu sistem informasi, yaitu Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Menurut Romney & Steinbart (2018: 10) sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan.

Menurut Turner, Weickgenannt, & Copeland (2017: 4) sistem informasi akuntansi meliputi proses, prosedur, dan sistem yang menangkap data akuntansi dari proses bisnis, mencatat data akuntansi ke dalam catatan yang sesuai, memproses data akuntansi secara terperinci dengan mengklasifikasikan, merangkum, dan mengkonsolidasikan serta melaporkan data akuntansi yang diringkas ke pengguna internal maupun eksternal.

Sistem informasi akuntansi sangatlah diperlukan dalam menunjang pemerintahan desa terutama dalam menjalankan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan prosedur yang semestinya agar dapat mempermudah dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten dalam hal ini yang berkaitan dengan APBDes. Sistem Informasi Akuntansi berperan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal itu dipertegas dengan adanya keharusan

menyusun APBDes yang dijelaskan didalam sebuah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut Sulina (2017) Faktor faktor yang mempengaruhi Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBDes adalah Lemahnya infrastruktur dan Sosialisasi teknologi informasi. Teknologi informasi sangatlah penting di masa sekarang, terlebih dengan menjalankan kegiatan pengelolaan APBDes yang tentunya tidak terlepas dari sarana prasarana teknologi informasi yang berkaitan erat tentunya dengan program aplikasi SISKEUDES sebagai alat bantu yang diperuntukkan untuk Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara komputerisasi sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Telaah peneliti terdahulu. Rina Setyawati (2019) Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa. Desa-desa di Kabupaten Bantul yang mengimplementasikan sistem ini melaporkan peningkatan akurasi dan ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini berarti data keuangan yang dihasilkan lebih andal dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa banyak aparat desa masih menghadapi kendala dalam mengoperasikan sistem karena keterbatasan pengetahuan teknologi. Untuk mengatasi masalah ini, pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi aparat desa sangat penting, memastikan mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk memanfaatkan sistem secara optimal.

Dedi Santoso (2021), Hasil penelitian ini menggarisbawahi bahwa implementasi Sistem Informasi Akuntansi Desa (SIA Desa) di Kabupaten Garut membantu meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Sistem ini

memungkinkan proses pelaporan keuangan menjadi lebih mudah dan transparan, sehingga masyarakat desa dapat dengan mudah mengakses informasi keuangan dan memastikan dana desa digunakan sesuai rencana. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala teknis, seperti gangguan jaringan internet yang sering terjadi dan kurangnya dukungan teknis yang memadai. Masalah ini dapat menghambat operasionalisasi sistem dan perlu diatasi melalui peningkatan infrastruktur teknologi serta penyediaan dukungan teknis yang kontinu.

Menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 pasal 37, laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Berdasarkan tujuan Sistem Informasi Akuntansi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu untuk mendukung operasi-operasi sehari-hari, untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, dan untuk memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai “Analisis Penerapan Sistem Informasi pelaksanaan APBDes Pada Pemerintahan Desa Oelasin”

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan APBDes Pada Pemerintahan Desa Oelasin.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka persoalan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi dalam pelaksanaan APBDes pemerintahan Desa Oelasin?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi dalam pelaksanaan APBDes yang dilaksanakan oleh pemerintahan Desa Oelasin.

1.4.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik

Penelitian ini dapat menambah kekayaan literatur yang dapat digunakan sebagai bahan untuk referensi mengenai penerapan sistem informasi akuntansi dalam pelaksanaan APBDes.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tinjauan informasi mengenai penerapan sistem informasi akuntansi dalam pelaksanaan APBDes.